

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan judul “Evaluasi Kebijakan Mitigasi Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara”, dapat ditarik kesimpulan :

##### **4.1.1 Efektifitas**

1. RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016. Perencanaan penanggulangan bencana tanah longsor dalam bentuk mitigasi ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara dan dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja pemerintah. Penyusunan RPJMD memuat visi misi dan program bupati terpilih berpedoman pada RPJPD dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMP Nasional. Arah kebijakan dan strategi yang terkait dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Banjarnegara tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2011-2016 masih memiliki arah dan strategi bersifat umum. Pengurangan resiko bencana menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan daerah, hal ini melibatkan banyak *stakeholders*. Upaya pengurangan resiko bencana harus dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan demi

terbentuknya ketangguhan dalam menghadapi bencana yang lebih efektif.

2. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, Perda ini dibuat sebagai dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah kabupaten Banjarnegara. Pengintegrasian kebijakan perencanaan pemerintah dengan strategi memasukan rencana pengurangan resiko bencana (PRB) ke dalam kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan langkah yang efektif sebagai dasar program mitigasi. Penyusunan rencana pengurangan resiko bencana, dikoordinasikan pemerintah daerah dengan BPBD Kabupaten Banjarnegara. Hal tersebut dilakukan melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu. Penanggulangan bencana pada situasi tidak terdapat potensi bencana atau pra bencana berfokus pada pencegahan dan mitigasi.
3. Peta Kawasan Bencana Tanah Longsor. Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana, BPBD menyusun informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan yang meliputi : luas wilayah kabupaten, kecamatan, dan desa. Dari 20 jumlah kecamatan yang ada, baru 10 kecamatan yang mempunyai peta rawan bencana tanah longsor, keterbatasan data dan peta wilayah tersebut berakibat pada terhambatnya analisis resiko bencana.

#### 4.1.2 Efisiensi

1. Sosialisasi, sosialisasi sebagai media yang digunakan oleh BPBD Kabupaten Banjarnegara dalam memberikan informasi kepada masyarakat terbilang belum cukup efektif. Karena masih adanya *gap* dalam penyampaian informasi itu sendiri. Selain itu BPBD juga belum memaksimalkan kemajuan teknologi yang ada sekarang untuk menyebarkan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Meskipun sosialisasi telah dilakukan, namun pelaksanaannya masih terbilang kurang apabila dibandingkan dengan jumlah titik daerah rawan longsor yang ada, mengingat luasnya daerah rawan tanah longsor di kabupaten Banjarnegara.
2. Pembentukan POKMAS, pembentukan POKMAS ini sangat efisien ditinjau dari segi biaya maupun waktu pelaksanaan, karena dalam satu kegiatan tersebut mater-materi edukasi yang ada dalam program mitigasi tanah longsor dikemas menjadi satu. Dengan muatan materi pembelajaran kepada masyarakat yaitu berupa : manajemen kebencanaan, desa tangguh bencana, konsep dan teknik mitigasi bencana, perawatan EWS, serta simulasi evakuasi, POKMAS yang dibentuk dapat memahami dengan jelas tentang konsep mitigasi tanah longsor sampai dengan pemeliharaan EWS.

#### **4.1.3 Kecukupan**

1. Ketaatan masyarakat pada regulasi dan program mitigasi. Ketaatan masyarakat pada program mitigasi nonstruktural bencana tanah longsor yang diselenggarakan oleh BPBD cukup baik, dukungan dan antusiasme masyarakat cukup besar, meskipun hal ini berbanding terbalik dengan alih fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat. Ketaatan masyarakat terhadap peta rawan bencana tanah longsor sebagai dasar pelaksanaan tata ruang, infrastruktur, tata bangunan masih rendah. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan kebutuhan manusia akan lahan, sementara disisi lain luas lahan relatif tetap. Hal ini menimbulkan perubahan alih fungsi lahan di sebagian besar wilayah di Kabupaten Banjarnegara.
2. Ketaatan BPBD, dilihat dari perencanaan program dan capaian dalam program mitigasi nonstruktural, ketaatan BPBD pada program mitigasi nonstruktural sangat baik dengan capaian 100%. Hal tersebut berarti mencerminkan bahwa mitigasi bencana tanah longsor telah dilakukan di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

#### **4.1.4 Ketepatan**

1. Pemasangan Alat EWS, EWS telah dipasang pada tempat yang tepat, yaitu di beberapa titik rawan longsor di Kabupaten Banjarnegara. Pemasangan *Early Warning System* (EWS) adalah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang potensi resiko bencana dan

kerentanan dikalangan masyarakat melalui jaringan komunikasi yang efektif untuk memberikan peringatan dini dengan akurasi yang tepat dan waktu tunggu ketika terjadi bencana disuatu titik dimana alat EWS tersebut dipasang. Namun disisi lain, karena rendahnya kesadaran masyarakat mengakibatkan EWS yang telah dipasang di beberapa tempat dirusak oleh warga sehingga EWS tidak dapat berfungsi dengan baik.

2. DESTANA, Desa Tangguh bencana dirancang sebagai upaya peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat untuk meminimisir resiko bencana. Upaya pengurangan resiko bencana (PRB) longsor dengan menempatkan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana sebagai pelaku utama juga sebagai subjek yang berpartisipasi langsung, akan lebih berdaya guna dan berkelanjutan. Masyarakat yang sudah mencapai ketangguhan terhadap bencana akan mampu mempertahankan struktur dan fungsinya sampai pada tingkat tertentu jika terjadi bencana longsor. Selain itu masyarakat juga dapat menjalankan pembangunana yang beradaptasi pada bencana dengan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan alam, mengingat hampir 70% wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah wilayah zona merah tanah longsor.

## 4.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menyampaikan rekomendasi/saran :

1. Sosialisasi sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat diharapkan dapat terselenggara dengan merata. Dengan memanfaatkan dan memaksimalkan kemajuan teknologi informasi.
2. Kerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan di Kabupaten Banjarnegara hendaknya dapat terjalin dengan baik agar sosialisasi dapat dilakukan secara masif dan menyeluruh, mengingat hal tersebut akan sulit terjadi jika hanya mengandalkan sumber daya manusia (SDM) yang ada pada BPBD Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah bersama dengan BPBD Kabupaten Banjarnegara maupun organisasi perangkat daerah yang lain selaku *stakeholders*, diharapkan mampu bekerja sama dan bersinergi dalam membuat regulasi yang menyangkut penyelenggaraan penanggulangan bencana guna menyelenggarakan program mitigasi yang berkelanjutan.